

## Pimpinan KPK Belum Terima Hasil Penyelidikan Komnas HAM soal TWK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait adanya pelanggaran HAM dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sampai akhir Minggu ini, setelah Komnas HAM mengemukakan hasil pemantauannya. KPK dan lembaga lainnya tidak menerima surat dan dokumen apapun dari Komnas HAM," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (20/8).

"KPK berpersepsi baik, mungkin Komnas HAM masih memerlukan waktu untuk merevisi atau melengkapi hasil pemantauannya," katanya.

Ghufon pun mengajak semua pihak untuk bersabar di tengah adanya simpang siur informasi. Ia mengatakan, ada Komisioner Komnas HAM yang menyatakan bahwa hasil tersebut tidak disampaikan kepada KPK. Namun, menurut Ghufron pada salah satu acara di TV, Komisioner lainnya menyatakan akan segera menyampaikan ke KPK. ■ han

"Untuk itu silahkan masyarakat menilainya, ini perlu KPK sampaikan supaya tidak ada penilaian KPK tidak responsif," ucapnya.

"KPK mengajak masyarakat untuk bersabar, menghormati Komnas HAM yang menyusun laporan hasil penyelidikan secara tertulis, walau mungkin rekomendasi itu tidak ditunjukkan kepada KPK sebagai laporan," ujar Ghufron.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan ada 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai aparat sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan.

Sebelas pelanggaran HAM tersebut adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian, hak atas pekerjaan, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

# 2 | Polhukum

IDN/ANTARA



## KEPALA BNPB MENINJAU TEMPAT ISOLASI TERPUSAT DI BALI

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito (kanan) berkomunikasi jarak jauh dengan pasien COVID-19 pada area tempat isolasi terpusat di Badung, Bali, Jumat (20/8). Kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional tersebut untuk meninjau tempat isolasi terpusat serta penanganan COVID-19 di Bali.

## 18 Pegawai KPK yang Sudah Lulus Diklat Bela Negara segera Diajukan Menjadi ASN

Ketua KPK Firli Bahuri berharap, 18 pegawai KPK yang dinyatakan lulus diklat bela negara dapat segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

JAKARTA (IM) - Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bela negara untuk 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir pada Jumat (20/8). Ketua KPK Firli Bahuri berharap, 18 pegawai tersebut lulus diklat untuk dapat segera menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agenda penutupan akan disertai dengan serah terima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bela negara dan wawasan kebangsaan kepada 18 Pegawai KPK," kata Firli melalui keterangan resminya, Jumat (20/8).

Firli mengatakan, berdasarkan penilaian selama pelaksanaan Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Budi Sukmo Wibowo, terpilih sebagai lulusan terbaik.

Selanjutnya, Sekjen KPK akan menindaklanjuti hasil diklat dengan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pengusulan 18 pegawai yang telah lulus Diklat Bela Negara

dan wawasan kebangsaan untuk diangkat menjadi ASN.

"Prosesnya tentu KPK bekerja sama dengan Kemenpan RB dan BKN RI," ujar Firli.

Sekjen KPK akan menyiapkan surat ke Menpan RB tentang permintaan persetujuan formasi 18 pegawai untuk menjadi ASN di KPK. Selanjutnya surat permohonan pengangkatan ASN dan pemberian NIP untuk 18 pegawai KPK untuk menjadi ASN ke BKN RI.

"KPK melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Firli menjelaskan, awalnya terdapat 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses alih status sebagai ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada proses tersebut, 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk menjadi ASN.

Dari jumlah yang lulus tersebut, 1.271 di antaranya telah dilantik sebagai Pegawai ASN pada tanggal 1 Juni 2021. Sementara pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi ASN, kata Firli, ada sebanyak 75 orang. 24 dari 75 orang itu dinyatakan masih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi ASN.

"24 orang di antaranya telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai APBN KPK," beber Firli.

"Namun, hanya 18 pegawai yang bersedia mengikuti diklat kerja sama KPK dengan Kementerian Pertahanan yang diselenggarakan pada 22 Juli sampai 20 Agustus 2021," imbuhnya.

Dengan demikian, diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang diikuti oleh 18 pegawai KPK tersebut telah rampung dilaksanakan selama sebulan. Rangkaian kegiatan terakhir tersebut ditutup dengan mengikuti Caraka Malam Api Semangat Bela Negara.

"Kegiatan akan ditutup dengan kehadiran 100% peserta, walaupun di minggu awal pelaksanaan Diklat 3 orang sedang isolasi mandiri sehingga

pada sebagian waktu harus berpartisipasi secara online," kata Firli.

Lebih lanjut, Firli membeberkan bahwa setiap materi pendidikan dan pelatihan bela negara, para peserta didampingi perwira pengawas, pendamping bimbingan, dan perwira pendamping kelas dari pihak Universitas Pertahanan dan KPK.

"Sepanjang 22 Juli sampai 20 Agustus 2021, 18 Pegawai sebagai peserta Diklat melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas sebagai penugasan dari Ketua Kelas untuk melatih kepemimpinan," ungkapnya.

Adapun, kata Firli, materi diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang diterima 18 pegawai KPK di dalam kelas yakni, nilai-nilai dasar bela negara; sistem pertahanan semesta.

Kemudian, wawasan kebangsaan (4 konsensus dasar bernegara); sejarah perjuangan

bangsa; pembangunan karakter bangsa; keterampilan dasar bela negara; serta identitas dan integritas nasional.

Sementara untuk kegiatan di luar kelas diisi dengan materi bimbingan dan penguatan; praktek baris berbaris; tugas individu; tugas kelompok; outbound/team building; serta olahraga berkelompok maupun mandiri.

"Tidak hanya menerima materi didalam kelas dan sejumlah kegiatan fisik untuk menjaga kedisiplinan dan kesehatan. Bimbingan mental rohani juga telah dilaksanakan dua kali, pertama berlokasi di Universitas Pertahanan dan kedua di Masjid Istiqlal," tutur Firli.

"Penyampai materi adalah Prof. Nazaruddin Umar selaku Imam besar Masjid Istiqlal, kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta baik muslim maupun non-muslim karena sifatnya universal. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan di area luar Masjid Istiqlal," katanya. ■ mei



## TARGET PENERIMA VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seorang anak saat vaksinasi massal di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/8). Presiden Joko Widodo menargetkan hingga akhir Agustus 2021 jumlah penerima vaksin COVID-19 di Indonesia mencapai 100 juta guna membentuk kekebalan kelompok sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir.

## Buntut Hakim Diserang Terdakwa, PN Banyuwangi Melapor ke MA

BANYUWANGI (IM) - Pengadilan Negeri Klas 1a Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan kasus penyerangan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh terdakwa Yunus Wahyudi kepada Mahkamah Agung.

Penyerangan terhadap majelis hakim oleh terdakwa dalam kasus penjemputan paksa jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 terjadi setelah Ketua Majelis Hakim Khamozaru Waruwu membacakan putusan dengan vonis tiga tahun penjara, pada Kamis (19/8) siang.

Pasca terjadinya penyerangan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang terjadi di dalam ruang sidang menandai kecaman. Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1a Banyuwangi pun melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Laporan tersebut untuk menentukan langkah hukum terhadap perbuatan anarkis

seorang terdakwa terhadap majelis hakim.

Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi I Komang Didiek Prayoga mengatakan, Pengadilan Negeri Banyuwangi juga meminta petunjuk Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya atas insiden penyerangan yang notebene merupakan perbuatan pelecahan dan penghinaan terhadap pengadilan.

Beruntung aparat kepolisian yang berjaga di dalam ruang sidang berhasil menghalau aksi terdakwa dan menyertakannya keluar ruang sidang. Aktivis antimasker yang dalam persidangan tidak mengenakan masker tersebut divonis tiga tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut empat tahun penjara. Terdakwa langsung digelandang paksa masuk ke mobil untuk dibawa ke Lapas Kelas 2b, Banyuwangi untuk menjalankan hukuman. ■ mei

## Pilar Utama Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19 adalah 3M yang Patuh

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito menegaskan, arah penanganan Covid-19 saat ini adalah mengubah pandemi Covid-19 menjadi endemi. Masyarakat akan dipastikan bisa hidup berdampingan dengan Covid 19.

"Untuk itu, tujuan besarnya kita akan nanti mengubah penanganan Covid 19 menjadi pengendalian, pengendalian Covid-19. Jadi arahnya itu merubah pandemi menjadi endemi. Sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 dan masyarakat menjadi produktif aman terhadap Covid," kata Ganip secara virtual, dikutip Jumat (20/8).

Menurut Ganip, untuk dapat menuju ke pengendalian pandemi ke endemi maka dibutuhkan tiga pilar.

"Pilar utama adalah pelaksanaan 3M yang patuh. Jadi protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker ini proteksi dini yang paling mudah dan bisa dilakukan setiap orang. Hanya butuh pendekatan sosialisasi dan edukasi untuk itu," kata Ganip.

Selain itu, kata Ganip, 3T yakni testing, tracing, dan treatment juga harus gencar dilaksanakan. Ditambah dengan covered vaksinasi juga harus tinggi. "Kemudian 3T yang tinggi. Pelaksanaan testing, tracing dan treatment ini juga harus tinggi. Yang ketiga adalah covered vaksinasi juga harus tinggi," tutur Ganip.

Ganip menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun roadmap untuk pengendalian Covid-19. Ganip yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menegaskan, tidak ada satu pun ahli yang bisa menjamin kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Kita semua harus optimis, pemerintah telah menyusun roadmap untuk pengendalian Covid-19 nasional. Kita tidak akan bisa sepenuhnya menghapus Covid-19 dalam waktu singkat. Karena tidak ada satu pun ahli ataupun orang yang bisa menjamin Covid ini kapan akan berakhir," katanya.

"Bahkan, yang sudah pasti kita ketahui adalah pertambahan dari varian baru. Ini yang perlu kita hati-hati dan kita waspadai," katanya. ■ mar

## Luhut: Ketidaksiplinan Jalankan Prokes Berpotensi Varian Delta Kembali Meningkat

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski kondisi penularan Covid-19 saat ini telah membaik, tetapi semua pihak tidak boleh lengah.

Luhut mengingatkan, ketidaksiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan berpotensi membuat sebaran varian Delta kembali meningkat.

"Saya tidak mau lagi karena kelengahan dan ketidaksiplinan kita nanti delta varian ini naik lagi, saya mohon diperhatikan," ujar Luhut, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/8).

Luhut menilai, kondisi saat ini sudah terbilang membaik jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, baik dari aspek penambahan kasus harian yang menurun, tingkat kesembuhan yang tinggi, dan

lainnya. Namun, Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali ini meminta semua pihak tetapi harus berhati-hati, termasuk dalam pelaksanaan uji coba protokol kesehatan pada sektor industri esensial dan domestik.

"Hal ini bisa dilihat di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, maupun Semarang Raya. Capaian ini dapat diraih berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, dari hasil sequencing terhadap varian baru virus corona di Indonesia, sebanyak 80 persennya adalah varian delta.

Sequencing merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus corona.

"Per 18 Agustus sudah lebih dari 5.000 sequencing dilakukan, dengan 80 persen hasil adalah varian delta," ujar Nadia dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/8).

Nadia mengungkapkan, ada 10 provinsi yang teridentifikasi memiliki sebaran varian Delta yang tinggi. Kesepuluh provinsi itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

"Kamiimbau provinsi-provinsi tersebut untuk lebih waspada dan meningkatkan testing dan tracing-nya. Mengingat jumlah varian delta yang terdeteksi cukup tinggi," kata Nadia. ■ mar



## RS DARURAT COVID-19 DI LANMAR SURABAYA

Tenaga kesehatan menata tempat tidur pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Karang Pucung, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/8). Rumah sakit darurat yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 bergejala ringan tersebut memiliki daya tampung 800 tempat tidur pasien.

## Panglima TNI Restui Keinginan Seorang Nakes Jadi Prajurit TNI

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsdal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. merestui keinginan Annisa Rizkika yang berprofesi sebagai relawan Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSDC Wisma Atlet menjadi Prajurit TNI. Annisa Rizkika menaruh hati, saat keinginannya direstui Panglima TNI.

Hal tersebut terjadi saat Panglima TNI Marsdal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meninjau langsung RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Panglima TNI menerima laporan bahwa jumlah pasien Covid-19 mengalami penurunan dan berkesempatan untuk melakukan dialog dengan para pasien, relawan, dan Nakes.

Salah seorang Nakes perempuan yang diketahui bernama Annisa Rizkika yang diajak dialog oleh Panglima TNI mengungkapkan keinginannya untuk menjadi TNI.

Annisa menyapa Panglima TNI dan meminta restu dari orang nomor satu di TNI agar dirinya dapat diterima menjadi

TNI Angkatan Laut.

"Mohon ijin bapak boleh bertanya? Saya minta restu ya pak ingin mendaftar Bintara Angkatan Laut," ujar Annisa.

Mendengar hal itu, Panglima TNI langsung menegaskan bahwa beberapa relawan Nakes yang bertugas di RSDC Wisma Atlet sudah diterima menjadi Prajurit TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, usai berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. "Kemarini Kasal sudah sampaikan beberapa relawan disini (RSDC Wisma Atlet) diterima di Bintara Angkatan Laut," jelasnya.

Untuk diketahui, Annisa merupakan relawan yang telah bertugas selama 1 tahun 5 bulan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sejak pertama kali rumah sakit itu beroperasi, tanggal 23 Maret 2020, Annisa belum pernah lagi bertemu dengan keluarganya.

"Saya terharu dan bahagia atas perhatian dan kemurahan hati Panglima TNI merestui cita-cita impian saya sejak kecil untuk menjadi tentara," ungkap Annisa. ■ mei

## Masa Penahanan Rudy Hartono Tersangka Korupsi Diperpanjang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (PT ABAM), Rudy Hartono.

Rudy Hartono merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Pt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Rudy Hartono Iskandar (RHI) masa penahanannya diperpanjang untuk 40 hari kedepan, terhitung sejak 22 Agustus 2021.

Alasan memperpanjang masa penahanan Rudy karena penyidik KPK masih butuh waktu untuk merampungkan berkas penyidikannya.

"Tim penyidik kembali memperpanjang masa penahanan tersangka RHI untuk 40 hari kedepan, terhitung mulai 22 Agustus 2021 sampai dengan 30 September 2021

di Rutan KPK Kavling C1," beber Ali melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (20/8).

"Pemberkasannya perkara ini masih terus berlanjut dengan agenda diantaranya pemanggilan para saksi terkait," ujarnya.

Rudy Hartono ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangun, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. Rudy diduga berperan ikut mengatur proses penawaran hingga penjualan tanah di Munjul yang kini merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan tiga orang dan satu korporasi dalam perkara ini. Adapun, tiga orang tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Peruma) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC). ■ han